

Jurnal Hukum Ekonomi & Bisnis

Program Studi Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana
Universitas Merdeka Malang

**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KONSUMEN PRODUK BARANG
JASA DALAM TRANSAKSI PERDAGANGAN MELALUI *E-COMMERCE***

**TANGGUNG GUGAT PERJANJIAN *MULTILEVEL MARKETING*
MENURUT PASAL 19 UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999**

**PERLINDUNGAN HAK-HAK MASYARAKAT DALAM
PENGEMBANGAN SISTEM IRIGASI UNTUK MENINGKATKAN
USAHA AGRIBISNIS MENURUT PASAL 41 AYAT (2) UU NOMOR 7
TAHUN 2004 TENTANG SUMBER DAYA AIR**

**PENYELESAIAN KREDIT MACET TANPA AGUNAN PADA KREDIT
USAHA RAKYAT**

**PERANAN SERIKAT PEKERJA SELURUH INDONESIA (SPSI) DALAM
MENANGANI PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA (PHK) MASSAL**

**PERJANJIAN WARALABA RITEL DITINJAU DALAM PERSPEKTIF
UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1999 TENTANG LARANGAN
PRAKTEK MONOPOLI DAN PERSAINGAN USAHA TIDAK SEHAT**

**PERLINDUNGAN HUKUM PIHAK KETIGA ATAS KERUGIAN AKIBAT
CAMPUR TANGAN PERUSAHAAN INDUK**

Jurnal Hukum Ekonomi & Bisnis

Program Studi Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana
Universitas Merdeka Malang

Volume 6, No.1, Juli 2008

DAFTAR ISI

IGN Adnyana	PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KONSUMEN PRODUK BARANG JASA DALAM TRANSAKSI PERDAGANGAN MELALUI <i>E-COMMERCE</i>	1
Hendra Djaja	TANGGUNG GUGAT PERJANJIAN <i>MULTILEVEL MARKETING</i> MENURUT PASAL 19 UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999	9
Teguh Suratman	PERLINDUNGAN HAK-HAK MASYARAKAT DALAM PENGEMBANGAN SISTEM IRIGASI UNTUK MENINGKATKAN USAHA AGRIBISNIS MENURUT PASAL 41 AYAT (2) UU NOMOR 7 TAHUN 2004 TENTANG SUMBER DAYA AIR	23
Totok Subianto	PENYELESAIAN KREDIT MACET TANPA AGUNAN PADA KREDIT USAHA RAKYAT	40
Aloysius	PERANAN SERIKAT PEKERJA SELURUH INDONESIA (SPSI) DALAM MENANGANI PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA (PHK) MASSAL	55
M. Ghufro	PERJANJIAN WARALABA RITEL DITINJAU DALAM PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1999 TENTANG LARANGAN PRAKTEK MONOPOLI DAN PERSAINGAN USAHA TIDAK SEHAT.	69
Dewi Astutty	PERLIDUNGAN HUKUM PIHAK KETIGA ATAS KERUGIAN AKIBAT CAMPUR TANGAN PERUSAHAAN INDUK	93

PENYELESAIAN KREDIT MACET TANPA AGUNAN PADA KREDIT USAHA RAKYAT

Oleh:
Totok Subianto¹

Abstract

The credit issue from The General Bank must understand and ensure the capacity and capability of credit receivers in paying off their debt according to the agreement. The capacity and capability factors must get good attention for the sake of bank as the credit issuer in general and every credit request that must be accompanied with the related credit guaranty. In analysis of the present journal, the author discusses the effort to solve the bad debt credit without security in community business loan.

Keywords: credit, security, bad debt credit

PENDAHULUAN

Aktivitas dan kebijakan perbankan Indonesia selalu mengikuti kemajuan ekonomi baik ekonomi pada pasar domestik maupun pasar global. Perkembangan perbankan selalu saja akan mengalami berbagai macam resiko yang nantinya akan mempengaruhi kesehatan perbankan sendiri. Apabila dahulu perbankan dapat tumbuh dan berkembang berdasarkan kebiasaan praktek yang diakui oleh masyarakat sebagai norma hukum tertulis, maka dengan kompleks dan semakin tingginya resiko yang dihadapi, praktek perbankan harus diatur oleh suatu sistem perundangan yang modern pula.

Fungsi utama perbankan Indonesia berdasarkan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 7 tahun 1992 tentang Perbankan, adalah sebagai penghimpun dan penyalur dana masyarakat. Sedangkan pemberian kredit merupakan salah satu aktivitas utama perbankan yang mampu memberi kontribusi pendapatan bagi pihak bank.

Dalam Pasal 24 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 disebutkan bahwa "Bank umum tidak memberikan kredit tanpa jaminan kepada siapapun juga.". Pada Surat Keputusan Dirut Bank Indonesia Nomor 23/69/Kep/Dir Tanggal 28 Pebruari 1991 tentang jaminan pemberian kredit yang dalam Pasal 1 ayat (1) disebutkan bahwa : "Bank tidak diperkenankan memberikan kredit kepada siapapun juga tanpa adanya jaminan ". Pada umumnya bank dalam memberikan kredit kepada pemohon kredit diperlukan adanya jaminan yaitu jaminan kebendaan , sedangkan jaminan yang memenuhi persyaratan ideal diantaranya:

- a. Yang dapat secara mudah membantu memperoleh kredit itu oleh pihak yang memerlukan.
- b. Yang tidak melemahkan potensi (kekuatan) usahanya.
- c. Yang memberikan kepastian kepada si pemberi kredit, dalam arti bahwa barang jaminan setiap waktu tersedia untuk di eksekusi, yaitu apabila perlu dapat mudah

¹ Totok Subianto adalah dosen tetap di Program Diploma Perbankan dan Keuangan Universitas Merdeka Malang

Pada tahap awal program, Kredit Usaha Rakyat (KUR) tanpa jaminan ini disediakan hanya terbatas oleh bank-bank yang ditunjuk oleh pemerintah saja, yaitu : Bank Rakyat Indonesia (BRI), Bank Negara Indonesia (BNI), Bank Mandiri, Bank Syariah Mandiri, Bank Tabungan Negara (BTN) dan Bank Bukopin. Penyaluran pola penjaminan difokuskan pada lima sektor usaha, seperti Pertanian, Perikanan Dan Kelautan, Koperasi, Kehutanan, Serta Perindustrian dan Perdagangan. Kredit Usaha Rakyat (KUR) tanpa agunan ini ditujukan untuk membantu ekonomi usaha rakyat kecil dengan cara memberi pinjaman untuk usaha yang didirikannya.

Diajukannya permohonan pinjaman kredit tanpa jaminan tersebut, tentu saja harus mengikuti berbagai prosedur yang ditetapkan oleh bank yang bersangkutan. Selain itu pemohon harus mengetahui hak dan kewajiban apa yang akan timbul dari masing-masing pihak yaitu debitur dan kreditur dengan adanya perjanjian Kredit Usaha Rakyat (KUR) tanpa agunan mengingat segala sesuatu dapat saja timbul menjadi suatu permasalahan apabila tidak ada pengetahuan yang cukup tentang KUR tanpa agunan ini.

Pada implementasi praktek perbankan dalam memberikan kredit kepada UMKM, terdapat banyak masalah seperti diantaranya pelanggaran kesepakatan yakni UMKM merasa tidak mampu mengembalikan sejumlah dana kredit yang telah mereka terima. Banyaknya UMKM yang tidak sanggup mengembalikan beban kredit akan mengganngu kesehatan bank. Dari kasus ini, penulis tertarik untuk mencari solusi dan memberikan pengetahuan kepada pembaca tentang kedudukan Bank yang mengalami kredit macet tanpa agunan khususnya bagi UMKM sebagai penerima kredit.

PEMBAHASAN

Pengertian Bank

Menurut Black Henry Campbell, seperti dikutip oleh Hermansyah³ memberi arti kepada bank sebagai suatu institusi yang mempunyai peran yang besar dalam dunia komersil yang mempunyai wewenang untuk menerima deposito, memberikan pinjaman, menerbitkan *promissory notes* yang sering disebut *bank bills* atau *bank notes*. Namun demikian fungsi bank yang orisinil adalah hanya menerima deposito berupa uang logam, plate, emas dan lain-lain.

Pasal 1 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan menyebutkan bahwa :

“Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan, menyalurkan kepada masyarakat dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.”

Jenis-Jenis Bank

a. Berdasarkan Fungsinya

- Bank sentral, yaitu Bank Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 Tentang Bank Indonesia.
- Bank Umum yaitu Bank yang memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.
- Bank Perkreditan Rakyat, yaitu bank yang dapat menerima simpanan hanya dalam bentuk simpanan, deposito berjangka atau bentuk simpanan yang disamakan dengan itu, bank umum yang mengkhususkan diri melaksanakan kegiatan tertentu. Yang dimaksud dengan mengkhususkan adalah melaksanakan kegiatan pembiayaan jangka panjang, pembiayaan untuk mengembangkan

³ Hermansyah, 2005, Hukum Perbankan Nasional Indonesia, Prenada Media, Jakarta, hal 30

a) Para pemilik uang/modal dapat secara langsung meminjamkan uangnya kepada pengusaha yang memerlukan untuk meningkatkan usahanya.

b) Para pemilik uang/modal dapat menyimpan uangnya pada lembaga-lembaga keuangan. Uang tersebut diberikan sebagai pinjaman.

2) Kredit dapat meningkatkan peredaran dan lalu lintas uang

Kredit uang disalurkan melalui rekening giro dapat menciptakan pembayaran baru seperti cek, giro, bilyet dan wesel sehingga dapat meningkatkan peredaran uang giral. Uang giral yang nantinya akan membuat lalu lintas uang akan berkembang pula.

3) Kredit dapat pula meningkatkan daya guna dan peredaran barang.

Dikatakan dapat meningkatkan daya guna barang karena dengan mendapatkan kredit, para pengusaha dapat memproses bahan baku menjadi bahan jadi. Di samping itu kredit dapat pula meningkatkan peredaran barang, baik melalui penjualan secara kredit maupun dengan membeli barang.

4) Kredit sebagai salah satu alat stabilitas ekonomi

Untuk menekan laju inflasi, dapat dilakukan melalui pemberian kredit yang selektif dan terarah, untuk melindungi usaha-usaha yang bersifat non spekulatif. Arus kredit diarahkan pada sektor-sektor yang produktif dengan pembatasan kualitatif dan kuantitatif. Tujuannya adalah untuk meningkatkan produksi dan memenuhi kebutuhan dalam negeri agar bisa diekspor.

5) Kredit dapat meningkatkan kegairahan berusaha

Bantuan kredit yang diberikan oleh bank akan dapat mengatasi

kekurangmampuan para pengusaha dibidang permodalan, sehingga secara tidak langsung pengusaha akan meningkatkan usahanya. Proses persaingan usaha yang sehat pun akan tumbuh dengan sendirinya. Hal ini akan berpengaruh pada pertumbuhan ekonomi disuatu bangsa.

6) Kredit dapat meningkatkan pemerataan pendapatan.

Dengan bantuan kredit dari bank para pengusaha dapat memperluas usahanya dan membuka lapangan kerja baru yang membutuhkan tenaga kerja. Para pencari kerja akan terbantu karena mereka disediakan lapangan pekerjaan yang ditawarkan oleh para pengusaha. Dengan begitu pemerataan pendapatan akan meningkat pula.

7) Kredit sebagai alat untuk meningkatkan hubungan internasional.

Bantuan dalam bentuk kredit tidak saja mempererat hubungan ekonomi antar Negara yang bersangkutan tetapi juga dapat meningkatkan hubungan internasional. Kredit yang dilakukan oleh dua Negara akan menimbulkan interaksi antara negara-negara pelaku kredit tersebut. Sehingga hubungan internasional pun akan terjalin.

c. Jenis-jenis Kredit

Penggolongan jenis-jenis kredit menurut Thomas Suyatno dkk⁹ dibagi menjadi 4 antara lain :

Menurut tujuannya terdiri atas :

1) Kredit konsumtif yaitu kredit yang diberikan dengan tujuan untuk memperlancar jalannya proses konsumsi.

2) Kredit produktif yaitu kredit yang diberikan dengan tujuan untuk memperlancar proses produksi.

⁹ Thomas Suyatno dkk, *Op-Cit*, hal 25-29

Kredit tanpa jaminan diberikan dalam keadaan tertentu, hanya dalam penilaian terhadap prospek usahanya atau dengan pertimbangan untuk pengusaha-pengusaha ekonomi lemah, biasanya diberikan untuk perusahaan yang benar-benar bonafid dan profesional, sehingga kemungkinan kredit tersebut macet sangat kecil.

c. Kredit dengan Agunan (*Secured loan*), antara lain

- 1) Agunan barang : barang tetap maupun tidak tetap (bergerak).
- 2) Agunan pribadi (*borgtocht*) : satu pihak (*borg*) menyanggupi pihak lainnya kreditur bahwa ia menjamin pembayarannya apabila si terutang (debitur) tidak menepati kewajibannya.
- 3) Agunan efek-efek saham, obligasi, sertifikat yang didaftar (*listed*) dibursa efek-efek.

d. Kredit dilihat dari sudut penggunaannya.

- 1) Kredit eksploitasi yaitu kredit berjangka waktu pendek yang diberikan oleh suatu bank kepada perusahaan untuk membiayai kebutuhan modal kerja digunakan untuk menutup biaya-biaya eksploitasi perusahaan secara luas.
- 2) Kredit investasi yaitu kredit jangka waktu menengah dan jangka panjang yang diberikan bank kepada perusahaan untuk melakukan investasi atau penanaman modal yang memerlukan untuk rehabilitasi/modernisasi maupun ekspansi proyek untuk meningkatkan produktivitas.

Tinjauan Umum Tentang Kredit Usaha Rakyat (KUR)

a. Pengertian Kredit Usaha Rakyat (KUR) tanpa agunan

Menurut Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 135/PMK.05/2008 tentang Fasilitas Penjaminan Kredit

Usaha Rakyat menyatakan bahwa Kredit Usaha Rakyat yang selanjutnya disingkat Kredit Usaha Rakyat (KUR) adalah kredit atau pembiayaan kepada UMKMK (Usaha Mikro, Kecil, Menengah Koperasi) dalam bentuk pemberian modal kerja dan investasi yang didukung fasilitas penjaminan untuk usaha produktif.

Kredit Usaha Rakyat (KUR) tanpa agunan adalah skema kredit/pembiayaan yang khusus diperuntukan bagi UMKMK dan Koperasi yang usahanya layak namun tidak mempunyai agunan yang cukupsesuai dengan persyaratan yang ditetapkan perbankan.²⁵

Usaha layak yang dimaksudkan disini adalah usaha yang telah berdiri selama minimal dua tahun dan telah dianggap mapan sesuai dengan prinsip Kredit Usaha Rakyat (KUR) tanpa agunan ini.

Menurut Undang-Undang nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah memberikan pengertian tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah yaitu :

Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.

Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari Usaha Menengah atau Usaha Besar yang memenuhi kriteria Usaha Kecil sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini.

²⁵ <http://menejemenkoperasi.blogspot.com>

Kredit dapat dikategorikan dalam kredit bermasalah apabila :¹¹

- a. Terjadi keterlambatan pembayaran bunga dan/atau kredit induk lebih dari 90 hari semenjak tanggal jatuh temponya.
- b. Tidak dilunasi sama sekali atau,
- c. Diperlakukan negosiasi kembali dengan syarat pembayaran kembali kredit dan bunga yang tercantum dalam pemberian kredit.
- d. Kredit Macet
 - 1) Terdapat tunggakan pokok dan/atau bunga yang melampaui 270 hari
 - 2) Dokumen kredit dan agunan tidak ada.,

Menurut Johannes Ibrahim sebaik-baiknya bank dalam melakukan analisis kredit dalam pemberian kredit, kemungkinan kredit macet pasti ada. Hal ini disebabkan oleh dua unsur, diantaranya¹².

- 1) Dari perbankan
Artinya dalam melakukan analisisnya, pihak yang melakukan analisis kurang teliti, sehingga apa yang terjadi, tidak diprediksi sebelumnya.
- 2) Dari nasabah/debitur
Dari pihak nasabah, kemacetan kredit dapat dilakukan akibat dua hal :
 - (a) Adanya unsur kesengajaan. Dalam hal ini nasabah sengaja untuk tidak melakukan pembayaran kepada bank sehingga kredit yang diberikannya menjadi macet.
 - (b) Adanya unsur ketidaksengajaan, artinya debitur mau membayar tetapi tidak mampu. Sebagai contoh kredit yang dibiayai mengalami musibah kebakaran,

kena hama, dan banjir sehingga berdampak kemampuan untuk membayar tidak ada.

Penyebab Terjadinya Kredit Bermasalah

Ada beberapa faktor yang menjadi penyebab terjadinya kredit bermasalah yaitu¹³.

a. Faktor intern bank, meliputi :

- 1) Rendahnya kemampuan atau ketajaman bank melakukan analisa kelayakan permintaan kredit yang diajukan debitur.

Rendahnya kemampuan melakukan analisis kredit secara profesional, terutama disebabkan karena rendahnya pengetahuan dan pengalaman petugas bank menjalankan tugasnya tersebut.

Tumpuhnya analisis kelayakan kredit sering kali terjadi karena pimpinan bank mendapatkan tekanan halus atau tidak dari pihak ketiga untuk meluluskan permintaan kredit, karena terjadi kolusi antara pimpinan bank dengan calon debitur, atau karena strategi pemberian kredit terlalu ekspansif. Strategi pemberian kredit yang terlalu ekspansif ini bisa timbul karena bank yang bersangkutan terlalu cepat menghimpun dana dari masyarakat (termasuk deposito), sehingga mendorong mereka menerapkan strategi penyaluran kredit yang melebihi tingkat kewajaran. Kredit yang diberikan tanpa analisis kredit yang profesional, dari semula memang sudah diragukan mutunya, oleh karena itu sejak diberikan kredit memang sudah membawa bibit masalah.

- 2) Lemahnya sistem informasi kredit, pengawasan dan sistem administrasi.

¹¹ Sutoyo Siswanto, 1997, Menangani Kredit Bermasalah, Pustaka Binawan Presindo, Jakarta, hal 12

¹² Johannes Ibrahim, 2004, Bank Sebagai Intermediasi Dalam Hukum Positif. CV. Utomo, Bandung, hal 118-119

¹³ Siswanto, Sutoyo. *Op-cit*, hal 18-19

dihadapi oleh debitur, cara bank menangani kredit bermasalah juga dipengaruhi oleh:⁵²

- a. Jumlah dana milik debitur yang diharapkan dapat dipergunakan untuk mengembalikan kredit,
- b. Jumlah kredit yang dipinjam debitur dari kreditur lain,
- c. Status dan nilai jaminan yang telah terikat, maupun
- d. Sikap debitur dalam menghadapi bank.

Dalam menyelesaikan kredit bermasalah menurut Siswanto Sutojo dapat dilakukan melalui :⁵³

- a. Organisasi intern bank.

Yang menjadi pertimbangan bank membentuk team khusus untuk menangani kredit bermasalah adalah sebagai berikut :

- 1) Waktu yang dibutuhkan untuk menangani kredit bermasalah,
 - 2) Obyektifitas penanganan,
 - 3) Pengalaman dan keahlian yang diperlukan, jumlah saldo kredit tertunggak
 - 4) dan tingkat beratnya masalah yang dihadapi.
- b. Penanganan kredit bermasalah melalui proses pengadilan dan di luar proses pengadilan. Bank menangani penyelesaian kredit bermasalah melalui proses pengadilan dilakukan antara lain bilamana bank mendapat bukti ada unsur penipuan atau kesengajaan di pihak debitur, atau apabila proses penyelesaian di luar pengadilan tidak membawa hasil seperti yang diharapkan. Sedangkan penanganan penyelesaian kredit bermasalah di luar proses pengadilan dilakukan bank apabila mereka masih mempunyai harapan dalam satu masa tertentu (dengan

bimbingan bank) debitur mampu mengumpulkan dana untuk melunasi kredit dan bunga tertunggak. Adapun penyelesaian dan penyelesaian kredit bermasalah yang dilakukan bank berdasarkan Surat Edaran bank Indonesia No. 26/4/BPPP tanggal 29 Mei 1993 adalah melalui :

- 1) Penjadwalan kembali pembayaran kredit (*rescheduling*)

Jangka waktu perpanjangan masa pembayaran kembali kredit tidak boleh terlalu lama. Apabila bank merasa perlu mengadakan perpanjangan masa pembayaran kembali yang kedua dan seterusnya (yang disertai syarat perjanjian lebih ketat), hal tersebut hanya dapat diberikan apabila bank yakin bahwa kondisi keuangan debitur telah menjadi lebih baik dari masasebelumnya.

- 2) Peninjauan kembali isi perjanjian kredit (*reconditioning*)

Baik sebagian maupun seluruhnya dilakukan seiring dengan keputusan bank menjadwalkan kembali pembayaran kredit. Tujuan utama dari peninjauan kembali isi perjanjian kredit adalah memperkuat kedudukan bank dalam ikatan perjanjian dengan debitur. Isi perjanjian yang dapat ditinjau kembali adalah :

- (a) Jumlah angsuran,
- (b) Jadwal pembayaran angsuran,
- (c) *Affirmative covenants*, yang memuat kesanggupan pihak pimpinan perusahaan melakukan sesuatu hal demi kepentingan kreditur. Hal-hal yang biasa dimasukkan dalam *affirmative covenants* antara lain adalah kesanggupan perusahaan debitur untuk

⁵² Sutoyo Siswanto, *Op-Cit*, hal 178

⁵³ Ibid, hal 181

resmi kepada debitur yang didalamnya mencantumkan batas waktu terakhir pelunasan tunggakan kredit.

- d. Penyelesaian kredit macet melalui PUPN dan BUPLN (Sekarang KPKNL).

Jika kredit bermasalah sudah dapat digolongkan sebagai kredit macet, maka untuk bank-bank milik negara di Indonesia dapat menyerahkan penyelesaian kredit macet kepada Panitia Urusan Piutang Negara (PUPN) dan Badan Urusan Piutang dan Lelang Negara (BUPLN). Sekarang Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL).

- e. Penyelesaian kredit bermasalah melalui jasa pengacara.

Jalan ini dapat pula ditempuh oleh sebuah bank, hanya penyelesaian melalui jasa pengacara akan

membutuhkan biaya yang relatif lebih besar karena harus membayar fee-nya, oleh karena itu sebelum memutuskan untuk menggunakan jasa pengacara, pihak bank harus membandingkan dulu jumlah kredit tertunggak dengan besarnya biaya yang harus dikeluarkan kemudian bagi pengacara.

KESIMPULAN

Dalam rumusan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan Pasal 1 Nomor 11 dan 12 menyebutkan : "Kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan dan kesepakatan pinjam meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi hutangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga."

TINJAUAN PUSTAKA

Ashshofa, Burhan, 2001, *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: PT. Rineka Cipta.

Badruzaman. Mariam Darus, 1991, *Perjanjian Kredit Bank*, Bandung, PT Citra Aditya Bakti.

Djumhana, Muhammad, 2000, *Hukum Perbankan di Indonesia*, Bandung, Citra Aditya Bakti.

Djohan, Warman, 2000, *Kredit Bank, Alternatif Pembiayaan dan Pengajuannya*, Jakarta : Mutiara Sumer Wijaya.

Firdaus Racmat, Maya Ariyanti, 1993, *Manajemen Perkreditan Umum*, Jakarta

Fuadi, Munir, 1999, *Hukum Perbankan Modern*, Bandung, Citra Aditya Bakti.

Hadinoto, Soetanto dkk, 2006, *Micro Credit Challenge Cara efektif Mengatasi Kemiskinan dan Pengangguran di Indonesia*, Jakarta: PT Elex Media Komputindo

Harahap, M. Yahya, 1986, *Segi-Segi Hukum Perjanjian*, Bandung Alumni,

Hermansyah, 2005, *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*, Jakarta, Prenada Media.

Sutopo HB, 2002, Metodologi Penelitian Kualitatif: Dalam Teori Terapannya dalam Penelitian, Surakarta, Universitas Sebelas Maret Press

.Sutarno, 2005, Aspek-Aspek Hukum Perkreditan pada Bank, Bandung, Alfabetha.

Suyatno, Thomas dkk, 2003, Dasar-Dasar Perikatan, Jakarta, Gramedia Pustaka Utama

Usman Rachmadi, 2001,, Aspek – Aspek Hukum Perbankan Di Indonesia, Jakarta : PT GramediaPustaka Utama

Widanarto, 1994, Hukum dan Ketentuan Perbankan di Indonesia, Jakarta, Pustaka Utama Grafiti

Wiwoho Jamal dkk, 2008,.Hukum Perbankan, Bandung, Citra Aditya Bakti

WiloejoWirjo Wijono. 2005. *“Pemberdayaan Lembaga Keuangan Mikro sebagai salah satu Pilar Sistem Keuangan Nasional”*. Kajian Ekonomi dan Keuangan EdisiKhusus.

dituangkan untuk melunasi hutangnya si penerima kredit (pengambil kredit).²

Sedangkan dalam ayat (2) disebutkan bahwa : “Jaminan pemberian kredit diperoleh Bank melalui penilaian seksama terhadap watak, kemampuan, modal, agunan dan prospek debitur.” Menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, bahwa sistem perbankan di Indonesia di dalam melakukan usahanya ber-asaskan demokrasi ekonomi dengan menggunakan prinsip kehati-hatian. Prinsip kehati-hatian (*prudent*) adalah salah satu konkretisasi dari prinsip kepercayaan dalam suatu pemberian kredit². Pada upaya Bank dalam memberikan kredit, bank wajib mempunyai keyakinan atau kemampuan dan kesanggupan terhadap calon penerima kredit untuk melunasi hutangnya sesuai yang diperjanjikan.

Pasal 8 Undang-Undang Perbankan menentukan bahwa :

“Dalam memberikan kredit Bank Umum wajib mempunyai keyakinan atas kemampuan dan kesanggupan penerima kredit untuk melunasi hutangnya sesuai dengan yang diperjanjikan.” Hal ini menunjukkan bahwa faktor kemampuan dan kesanggupan harus benar-benar diperhatikan, dan untuk kepentingannya pihak bank selaku pemberi kredit pada umumnya setiap permohonan kredit harus diikuti adanya jaminan kredit yang bersangkutan.

Jenis kredit dilihat dari sudut jaminan dibagi 2 (dua) yaitu : Kredit tanpa jaminan (*Unsecured Loan*) dan kredit dengan agunan (*Secured Loan*). Pada perkembangannya dan pelaksanaannya, tidak semua bank telah menerapkan kredit tanpa

agunan, namun dalam beberapa terakhir ini muncul suatu kredit tanpa agunan yang disebut Kredit Usaha Rakyat (KUR) tanpa jaminan. Lain hal lagi, kredit dengan agunan yaitu kredit yang dilakukan dengan menyertakan agunan seperti apa yang telah diperjanjikan. Agunan yang disertakan bias berupa agunan barang, agunan pribadi (*borgtocht*) dan agunan efek-efek saham.

Perguliran KUR dimulai adanya Keputusan Sidang Kabinet Terbatas yang diselenggarakan pada tanggal 9 Maret 2007 bertempat di kantor Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (UKM) dipimpin oleh Bapak Presiden RI. Salah satu agenda keputusannya antara lain bahwa dalam rangka pengembangan Usaha Mikro, Kecil Menengah (UMKM) dan Koperasi, pemerintah akan mendorong peningkatan akses pelaku UMKM dan Koperasi kepada kredit/pembiayaan dari perbankan melalui peningkatan kapasitas perusahaan penjamin.

Kredit Usaha Rakyat (KUR) diluncurkan oleh Presiden Susilo Bambang Yudoyono pada tanggal 5 Nopember 2007 dengan didukung oleh Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2008 tentang Fokus Program Ekonomi tahun 2008-2009 untuk menjamin implementasi atau percepatan pelaksanaan KUR ini, berbagai kemudahan bagi UMKM pun ditawarkan oleh pemerintah. Beberapa diantaranya adalah penyelesaian kredit bermasalah UMKM dan pemberian kredit UMKM hingga RP. 500 juta. Dimana Inpres tersebut didukung oleh pemerintah.

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 135/PMK.05/2008 tentang Fasilitas Penjaminan Kredit Usaha Rakyat (KUR). Jaminan Kredit Usaha Rakyat (KUR) sebesar 70% bisa ditutup oleh pemerintah melalui PT. Asuransi Kredit Indonesia (Askrindo) dan perusahaan Sarana Pengembangan Usaha dan 30% ditutup oleh Bank pelaksana.

² Subekti, Jaminan-Jaminan Untuk Pemberian Kredit Menurut Hukum Indonesia, Alumni, Bandung, 1986, hal. 29

² Munir Fuadi, Hukum Perkreditan Kontemporer, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1996, hal :21

koperasi, pengembangan ekspor non migas dan sebagainya.

b. Berdasarkan Kepemilikannya

- Bank Umum Milik Negara, yaitu bank didirikan berdasarkan UU.

- Bank Umum Swasta, yaitu bank yang hanya dapat didirikan dan menjalankan usaha setelah mendapatkan izin dari Menteri Keuangan dengan mendengarkan pertimbangan Bank Indonesia.

- Bank Campuran yaitu bank umum yang didirikan bersama-sama oleh satu atau lebih bank umum yang berkedudukan di Indonesia dan didirikan oleh warga Negara Indonesia atau badan hukum Indonesia dengan satu atau lebih bank yang berkedudukan di luar negeri.

- Bank Pembangunan Daerah yaitu bank milik Pemerintah Daerah yang disesuaikan dengan Bank Umum.

Pengertian Kredit

Thomas Suyatno dkk⁴ memaknai kredit sebagai suatu kepercayaan seseorang atau badan yang memberikan kredit (kreditur) percaya bahwa penerima kredit (debitur) di masa mendatang akan sanggup memenuhi segala sesuatu yang telah dijanjikan yaitu dapat berupa barang, uang atau jasa.

Jamal Wiwoho dkk⁵, member pengertian kredit yaitu :

“Penyediaan uang atau tagihan atau hak untuk menagih antara kreditur dengan debitur yang dituangkan dalam suatu perjanjian tertulis mengenai jumlah kredit, jangka waktu, bunga dan jaminan kredit.” Dalam bukunya Hukum Perbankan Nasional Indonesia, Hermansyah⁶ mengemukakan bahwa : “Makna dari kepercayaan adalah

keyakinan dari bank sebagai kreditur bahwa kredit yang diberikan akan sungguh-sungguh diterima kembali dalam jangka waktu tertentu sesuai dengan kesepakatan.”

a. Unsur-Unsur Kredit

Pemberian kredit merupakan suatu pemberian kepercayaan. Tanpa keyakinan tersebut, suatu lembaga kredit tidak akan meneruskan simpanan masyarakat yang diterimanya. Menurut Thomas Suyatno dkk⁷, dalam bukunya Dasar-dasar Perkreditan dapat disimpulkan bahwa unsur-unsur yang terdapat dalam kredit adalah :

1) Kepercayaan yaitu keyakinan dari si pemberi kredit bahwa prestasi yang diberikan baik dalam bentuk uang, barang, atau jasa akan benar-benar diterimanya kembali dalam jangka waktu tertentu di masa yang akan datang.

2) Waktu yaitu suatu masa yang memisahkan antara pemberian prestasi dengan kontraprestasi yang akan diterima pada masa yang akan datang.

3) *Degree of risk* yaitu suatu tingkat resiko yang akan dihadapi sebagai akibatadanya jangka waktu yang memisahkan antara pemberian prestasi dengan kontraprestasi semakin tinggi pula tingkat resikonya. Dengan adanya unsur resiko inilah maka timbulah jaminan pemberian kredit.

4) Prestasi (objek kredit) tidak saja diberikan dalam bentuk uang tetapi barang dan jasa juga.

b. Fungsi Kredit

Fungsi kredit perbankan dalam kehidupan perekonomian dan perdagangan antara lain sebagai berikut⁸ :

1) Kredit pada hakekatnya dapat meningkatkan daya guna uang

⁴ Thomas Suyatno dkk, *Op-Cit*, hal 12

⁵ Jamal Wiwoho dkk, 2008, Hukum Perbankan, Citra Aditya Bakti, Bandung, hal 10

⁶ Hermansyah, *Op-Cit*, hal 56

⁷ Muhammad Djumhana, *Op-Cit*, hal 371

⁸ Ibid, hal 372

- 3) Kredit perdagangan yaitu kredit yang diberikan dengan tujuan untuk membeli barang-barang untuk dijual lagi.

Menurut jangka waktunya.

1). Kredit Jangka Pendek (*Short Term Loan*)

Kredit jangka pendek (*short term loan*) yaitu kredit yang berjangka waktu maksimum 1 tahun. Kredit jangka pendek dapat berbentuk : (1). Kredit rekening Koran, yaitu kredit yang diberikan oleh bank kepada nasabahnya dengan plafon tertentu, perusahaan mengambilnya sebagian demi sebagian sesuai dengan yang dibutuhkan. Bunga yang dibayar hanya untuk jumlah yang betul-betul dipergunakan, walaupun perusahaan mendapatkan kredit lebih dari jumlah yang dipakainya. (2). Kredit penjualan (*Leveranciers Credit*), yaitu kredit yang diberikan oleh penjual dengan menyerahkan barangnya terlebih dahulu baru kemudian menerima pembayarannya dari pembeli. (3). Kredit pembeli (*Afnemer Credit*) yaitu kredit yang diberikan pembeli kepada penjual dimana menyerahkan uang terlebih dahulu sebagai pembayaran baru kemudian (setelah, beberapa waktu) menerima barang-barang yang dibelinya. (4). Kredit wesel, yaitu kredit yang terjadi apabila suatu perusahaan mengeluarkan Surat Pengakuan Hutang yang berisikan kesanggupan untuk membayar sejumlah uang setelah ditandatangani surat wesel tersebut dapat dijual dan diuangkan kepada bank (surat *promes/payable notes*)(5). Kredit eksploitasi yaitu kredit yang diberikan oleh bank untuk membiayai *current operation* suatu perusahaan.

2). Kredit Jangka Menengah (*Medium Term Loan*)

Kredit jangka menengah (*Medium Term Loan*) yakni kredit berjangka waktu 1 sampai 3 tahun. Kredit yang berjangka waktu menengah ini diantaranya adalah kredit modal kerja permanen (KMKP) yang diberikan oleh bank kepada pengusaha golongan lemah yang berjangka waktu maksimum 3 tahun.

3). Kredit Jangka Panjang (*Long Term Loan*)

Kredit jangka panjang (*Long term Loan*), yaitu kredit yang berjangka waktu lebih dari 3 tahun. Kredit jangka panjang pada umumnya adalah kredit investasi yang bertujuan menambah modal perusahaan dalam rangka untuk melakukan rehabilitasi, ekspansi (perluasan) dan pendirian proyek baru.

Kredit dilihat dari sudut jaminannya, dibedakan:

a. Kredit Tanpa jaminan (*Unsecured loan*)

Dalam SK Direksi BI No. 23/69/KEP/DIR tertanggal 28 Februari 1991 tentang Jaminan Pemberian Kredit, telah diatur ketentuan bahwa bank tidak diperenankan memberikan kredit kepada siapapun tanpa jaminan kredit sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 b yaitu Keyakinan bank atas kesanggupan debitur untuk melunasi kredit sesuai dengan yang diperjanjikan. Namun dalam perkembangannya ketentuan tersebut sudah tidak berlaku lagi.

b. Kredit Tidak memakai jaminan (*Unsecured loan*)

Yaitu kredit yang diberikan benar-benar atas dasar kepercayaan saja, sehingga tidak ada "pengaman" sama sekali. Kredit ini biasanya terjadi diantara sesama pengusaha (untuk tujuan produktif), atau diantara teman, keluarga, family (biasanya untuk konsumtif)¹⁰.

¹⁰ Rachmat Firdaus, Maya Ariyanti, 1993, Manajemen Perkreditan Bank Umum, Jakarta, hal 18

Usaha Menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan Usaha Kecil atau Usaha Besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini

Peluncuran Kredit Usaha Rakyat (KUR) merupakan tindak lanjut dari ditandatanganinya Nota Kesepahaman Bersama (MoU) pada tanggal 9 Oktober 2007 tentang penjamin kredit/pembiayaan kepada UMKM dan Koperasiantara pemerintah (Menteri Negara Koperasi dan UKM, Menteri Keuangan, Menteri Pertanian, Menteri kehutanan, Menteri Kelautan dan Perikanan, Menteri perindustrian, Perusahaan Penjamin (Perum Sarana Pengembangan Usaha dan PT Asuransi Kredit Indonesia dan Perbankan (Bank BRI, Bank Mandiri, Bank BNI, Bank BTN, Bank Bukopin, dan bank Syariah Mandiri). Kredit Usaha Rakyat (KUR) didukung oleh Kementrian Negara BUMN, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian serta Bank Indonesia.

- b. Landasan Operasional Kredit Usaha Rakyat (KUR) tanpa agunan

Landasan operasional KUR adalah Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2008 tentang Fokus Program Ekonomi Tahun 2008-2009 untuk menjamin implementasi atau percepatan pelaksanaan KUR dan Nota Kesepahaman bersama antara Departemen Teknis, Perbankan dan perusahaan Penjamin yang ditandatangani tanggal 9 Oktober 2007.

- c. Penggolongan Kredit Usaha Rakyat (KUR) tanpa agunan

Sejak diluncurkan oleh Presiden Susilo Bambang Yudoyono pada tanggal 5 Nopember 2007 Kredit Usaha Rakyat (KUR) ditawarkan dengan berbagai pilihan antara lain :

- Kredit Usaha Rakyat (KUR) sampai dengan 500 juta
 - Kredit Usaha Rakyat (KUR) (Mikro) sampai dengan 5 juta
 - Kredit Usaha Rakyat (KUR) Linkage Program
- d. Tujuan Kredit Usaha Rakyat (KUR) tanpa agunan
 - Untuk mempercepat pengembangan sektor riil dan pemberdayaan UMKM
 - Untuk meningkatkan akses pembiayaan kepada UMKM dan Koperasi.
 - Untuk menanggulangi kemiskinan dan perluasan kesempatan kerja.
 - e. Instansi Pembina Kredit Usaha Rakyat (KUR) tanpa agunan
 - Kementrian Negara Koperasi dan UKM
 - Departemen Pertanian
 - Departemen Kelautan dan Perikanan
 - Departemen Perindustrian
 - Departemen Kehutanan dan Instansi terkait lainnya.

Pengertian Dasar Kredit Bermasalah

Dikatakan kredit bermasalah apabila debitur mengingkari janjinya membayar bunga dan/atau kredit induk yang telah jatuh tempo, sehingga terjadi keterlambatan pembayaran atau sama sekali tidak ada pembayaran, dengan demikian mutu kredit menjadi merosot. Dalam kredit bermasalah ini kemungkinan ada kreditur yang terpaksa melakukan tindakan hukum Sehingga bank harus mengalokasikan perhatian, tenaga, dana, waktu dan usaha secukupnya guna menyelesaikan kredit bermasalah.

Lemahnya sistem pengawasan dan administrasi kredit, berakibat pimpinan bank tidak dapat memantau penggunaan kredit serta perkembangan kegiatan usaha maupun kondisi keuangan debitur secara cermat. Akibatnya mereka tidak dapat melakukan tindakan koreksi apabila terjadi penurunan kondisi bisnis atau keuangan debitur atau terjadi penyimpangan dari perjanjian kredit.

- 3) Campur tangan yang berlebihan dari para pemegang saham bank dalam keputusan pemberian kredit. Campur tangan pemegang saham yang berlebihan terhadap penerapan kebijakan perkreditan bank dapat menimbulkan pemberian kredit yang menyinggung dari asas perkreditan yang sehat.
- 4) Pengikatan jaminan kredit yang kurang sempurna. Jaminan kredit merupakan sumber kedua dana pelunasan kredit. Apabila debitur tidak bersedia melunasi saldo kredit dan bunga yang termasuk, bank dapat mengeksekusi jaminan guna melunasi pinjaman yang tertunggak. Apabila ikatan jaminan diadakan secara sempurna dan jaminan dapat dieksekusi dengan lancar, maka tunggakan pinjaman debitur dapat diselesaikan dengan cepat. Sebaliknya apabila pengikatan jaminan tidak dilakukan dengan sempurna, dapat terjadi penyebab tunggakan pinjaman berkembang menjadi kredit yang harus dihapus.

b. Faktor Debitur

Debitur bank terdiri dari dua kelompok, yaitu perorangan dan perusahaan atau koperasi. Sumber dana pembayaran bunga dan angsuran kredit sebagian besar berasal dari debitur perorangan yang berasal dari penghasilan tetap mereka, misalnya

gaji, upah, honorarium, dan sebagainya.

Setiap jenis gangguan terhadap kesinambungan penerimaan penghasilan tetap itu akan mengganggu likuidasi keuangan mereka, sehingga menyebabkan ketidak lancaran pembayaran bunga dan/atau cicilan kredit.

Penyebab kredit bermasalah perorangan yang lain yang erat hubungannya dengan gangguan terhadap pribadi debitur, misalnya kecelakaan, sakit, kematian dan perceraian. Sedangkan penyebab kredit korporasi bermasalah pada umumnya disebabkan karena salah arus (misal: manajemen), kurangnya pengetahuan dan pengalaman pemilik perusahaan dalam bidang usaha yang mereka jalankan, dan karenanya adanya penipuan.

c. Faktor Ekstern dari bank

Penyebab kredit bermasalah yang dapat dikategorikan sebagai faktor ekstern antara lain adalah :

- 1) Kegagalan usaha debitur.
- 2) Penurunan kegiatan ekonomi dan tingginya suku bunga.
- 3) Musibah yang terjadi pada debitur atau kegiatan usahanya.
- 4) Pemanfaatan iklim persaingan perbankan yang tidak sehat oleh debitur.

Pedoman Penanganan Kredit Bermasalah

Langkah pertama yang harus segera diambil setelah bank mendeteksi adanya gejala kredit bermasalah adalah menentukan seberapa besar masalah yang sedang dihadapi debitur. Hal itu diperlukan karena cara penanganan selanjutnya akan oleh tingkat besar kecilnya masalah tadi. Selain ditentukan oleh besar kecilnya masalah yang

menyerahkan daftar keuangan perusahaan, sesuai dengan jadwal yang ditentukan, kewajiban perusahaan debitur untuk memelihara tingkat likuiditas keuangan, kesanggupan perusahaan debitur untuk melaporkan perubahan susunan atau personalia Dewan Komisaris dan atau Dewan Direksi.

- (d) *Negative covenants*, yang memuat kesanggupan debitur untuk tidak melakukan sesuatu hal selama masa perjanjian kredit, kecuali bilamana memberitahuka dan mendapat persetujuan dari kreditur terlebih dahulu.

- (e) *Restrictive clauses*, Isi *restrictive clauses* hampir sama dengan *negative covenants* yaitu mewajibkan debitur selama masa berlakunya perjanjian kredit, tidak melakukan tindakan tertentu, perbedaannya hanya terletak pada tingkat pembatasannya. Pada *negative covenants* kesanggupan debitur bersifat mutlak, yaitu tidak boleh melakukan sesuatu hal tanpa persetujuan kreditur terlebih dahulu. Sedangkan pada *restrictive clauses* debitur masih diperkenankan melakukan sesuatu yang dilarang dalam *negative covenants* tetapi dalam batas-batas tertentu. Sebagai contoh, debitur diperkenankan membagikan deviden maksimal sebesar satu jumlah prosentase tertentu dari laba sesudah pajak.

- (f) *Even of defaults*.

Yang dimaksud *Even of defaults* adalah hal-hal yang bilamana terjadi (atau syarat tertentu yang bilamana tidak dipenuhi), menyebabkan debiturnya dinyatakan tidak memenuhi janji, sehingga secara otomatis bank dapat menyatakan bahwa perjanjian kredit batal. Akibatnya debitur wajib secepatnya membayar kembali saldo kredit yang masih terhutang. Klausula ini diadakan dengan tujuan melindungi bank dari bahaya terseret pada persoalan kredit bermasalah secara berlarut-larut.

- 3) Penataan kembali (*reorganization and recapitalization*).

Upaya penataan kembali struktur kepemilikan, organisasi, dan operasi bisnis perusahaan debitur secara professional dapat menyehatkan operasi bisnis debitur. Dalam rangka penataan kembali operasi bisnis dan memperkuat kondisi keuangan perusahaan debitur, diperlukan rekapitalisasi yang dapat berbentuk memasukkan modal saham baru atau mengkonversi saldo kredit berikut bunga tertunggak menjadi saham.

- c. Penangan kredit bermasalah dengan jalan penagihan.

Selain dengan cara-cara seperti di atas, bank juga dapat melakukan penyelesaian kredit bermasalah dengan cara melakukan penagihan. Penagihan dapat dilakukan baik oleh pihak bank sendiri maupun melalui jasa pihak ketiga. Untuk melakukan penagihan, bank harus mengirimkan surat tagihan

- Idroes, Ferry N dan Sugiarto, 2006, *Manajemen Risiko Perbankan dalam Konteks Kesepakatan Basel dan Peraturan Bank Indonesia*, Edisi Pertama Yogyakarta: Graha Ilmu
- Kaputra, Hanif Iswan dkk, 2002, *Usaha Kecil & Mikro Di Tengah Arus Globalisasi: Pengalaman Usaha Kecil Dan Mikro Dampingan Bitra Indonesia*, Jakarta: Bitra Indonesia.
- Lexy J, Moleong, 1997, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Remaja Rosdikarya, Bandung.
- Maky, Abdullah, Lili Setia Permana, 2008, *Kur di Kuningan Menyerap Tenaga Kerja Baru, dalam bertindak Untuk rakyat*, Jakarta
- Mahmoeddin As, 2000, *Melacak Kredit Bermasalah*, Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.
- Mintorowati, Endang, 1999, *Hukum Perjanjian*, Surakarta, Universitas Sebelas Maret Surakarta.
- Muhamad, Abdulkadir, 2000, *Hukum Perdata Indonesia*, Bandung Citra Aditya Bakti.
- Muljadi Kartini, Gunawan Widjaja, 2004, *Perikatan Yang Lahir Dari Perjanjian*, Jakarta, PT. Raja Grafindo.
- Rudi, J.C.T. Simorangkir T Erwin JT Prasetyo, 2002, *Kamus Hukum Jakarta*, Sinar Grafika.
- Remy, Sutan, 1993, *Kebebasan Berkontrak dan Perlindungan Yang Seimbang Bagi Para Pihak Dalam Perjanjian Kredit Bank di Indonesia*, Jakarta : Institut Bankir Indonesia.
- R.Tjiptoadinugroho, 1994, *Perbankan Masalah Perkreditan*, Jakarta: Pradnya Paramita.
- Satrio, J, 2007, *Hukum Jaminan Hak Jaminan Kebendaan*, Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Singarimbun, Masri dan Sofian Efendi. 1989, *Metode Penelitian Survei*, Jakarta: LP3ES.
- Sitompul, Zukarnaen, 2005, *Problematika Perbankan*, Bandung: Terrace & Library.
- Soekanto, Soerjono, 1982, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Press.
- Subanar, Harimurti, 2004, *Manajemen Usaha Kecil*, Yogyakarta: BPFE.
- Suryabrata, Sumadi, 1998, *Metodologi Penelitian*, Jakarta : Raja Grafindo Persada.
- Suhardi, Gunarto, 2007, *Usaha Perbankan dalam Perspektif Hukum*, Yogyakarta, Kanisius
- Supramono, Gatot, 1995, *Perbankan dan Masalah Kredit*, Jakarta, Djambatan.

PERANAN SERIKAT PEKERJA SELURUH INDONESIA (SPSI) DALAM MENANGANI PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA (PHK) MASSAL

Oleh
Aloysius¹

Abstract

Paradigm and treatment practice from the employers to their employees has developed. The employers view their employees as production factors that have the same position with other production factors such as capital, machine, etc.

Such treatment tends to pressurize labor related cost such as wage, welfare, etc. If they don't do so, the total production cost will be high so the profit employers obtain will be smaller. In the other side, the employers try to increase the productivity. It seems that the employees don't have bargaining power to deal with the employers.

The analysis in the present journal discusses the role of labor unions in Indonesia in dealing with the practice of mass lay off.

Keywords: labor union, layoff

PENDAHULUAN

Tenaga kerja Indonesia mempunyai peranan dan kedudukan yang sangat penting dalam tujuan pembangunan ekonomi, oleh karenanya sesuai dengan peranan dan kedudukannya diperlukan pembangunan ketenagakerjaan untuk meningkatkan kualitas dan kontribusinya dalam pembangunan nasional.

Pembangunan nasional adalah merupakan upaya pemerintah untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Pembangunan ekonomi sebagai bagian dari pembangunan nasional dapat dicapai dengan melakukan pemantapan industri nasional dengan didukung beberapa factor, antara lain : (1) perluasan kesempatan bekerja dan perluasan berusaha. (2) pemerataan kesejahteraan rakyat (3) penggunaan produksi dalam negeri dll

Pemantapan industri nasional itu sendiri dapat dicapai dengan didukung peningkatan kualitas sumber daya manusia Indonesia yang menentukan berhasil tidaknya usaha untuk memenuhi tahap tinggal landas.

Tenaga kerja sebagai sumber daya manusia dalam mencapai tujuan dan proses pembangunan di bidang ekonomi sangat memegang peranan penting, karena dapat mempengaruhi produktifitas yang selanjutnya mempengaruhi terhadap kelancaran industri nasional. Jadi apabila kualitas sumber daya manusianya baik, maka kinerja tenaga kerja dan perusahaan akan menjadi baik. Peningkatan kualitas tenaga kerja merupakan factor utama yang dapat mempengaruhi kualitas dan kuantitas hasil kerja/produksi. Namun demikian peningkatan kualitas Sumber daya manusia tidak mungkin tercapai tanpa memberikan jaminan hidup kepadanya dan keluarganya, sebaliknya jaminan hidup tidak tercapai apabila manusia tidak mempunyai pekerjaan, dimana pekerjaan itu

¹ Aloysius adalah dosen tetap di Fakultas Hukum Universitas Merdeka Malang